KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

V3AYKCYW

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 7 1 2			H.4 X Final		
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 92 433 260 4 741 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : TAUFIK RACHMAN							
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK	PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1 21-402-0)1	5.563.200	5.563.200	0	5	278.160	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 283							
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyyy							
PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi	:						
C.4 Tanggal	:	2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan	:	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan batandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	